



Analisis Program Pemberdayaan UMKM Melalui Pendampingan Peran Pemerintah Kecamatan Dan Partisipasi Pelaku UMKM Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Lokal Di Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan

Effendi Sadly¹, Milla Naeruz², Amrani³

^{1,2,3} Ekonomi Pembangunan, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Sumatera Utara
effendi.sadly@fe.uisu.ac.id¹, milla.naeruz@gmail.com², amrani@fe.uisu.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses pemberdayaan UMKM melalui pendampingan, peran pemerintah kecamatan, dan partisipasi pelaku UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada makna, proses, dan pengalaman aktor yang terlibat dalam program pemberdayaan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan kuesioner terbuka kepada aparatur pemerintah kecamatan, pendamping UMKM, dan pelaku UMKM. Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik melalui tahapan membaca data, pengodean, pengelompokan tema, dan penafsiran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan berperan dalam meningkatkan kapasitas pelaku UMKM, terutama dalam pengelolaan usaha dan adaptasi terhadap perubahan pasar. Peran pemerintah kecamatan terlihat melalui fungsi fasilitasi, koordinasi, dan dukungan terhadap pelaksanaan program. Partisipasi pelaku UMKM menjadi faktor kunci yang menentukan efektivitas program pemberdayaan, karena keterlibatan aktif mendorong adopsi inovasi dan kolaborasi usaha. Namun, tingkat partisipasi dan keberhasilan program dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti akses pasar dan dukungan sumber daya.

Kata Kunci: Pemberdayaan UMKM, Pendampingan, Peran Pemerintah Kecamatan, Partisipasi, Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Abstract

This study aims to understand the process of MSME empowerment through mentoring, the role of sub-district government, and the participation of MSME actors in promoting local economic growth in Medan Tuntungan Sub-district, Medan City. The study uses a qualitative approach with a focus on processes, experiences, and meanings constructed by actors involved in empowerment programs. The research subjects include sub-district government officials, MSME mentors, and MSME actors. Data were collected through in-depth interviews and open-ended questionnaires. Data analysis was conducted using a thematic approach through stages of data reduction, coding, theme development, and interpretation. The findings show that mentoring plays a role in improving the capacity of MSME actors, especially in business management and adaptation to market changes. The role of the sub-district government is reflected through facilitation, coordination, and support for the implementation of empowerment programs. The participation of MSME actors becomes a key factor in determining program effectiveness, as active involvement encourages innovation adoption and business collaboration. The study also finds that program effectiveness is influenced by external factors such as market access and resource support.

Keywords: MSME Empowerment, Mentoring, Sub-District Government Role, Participation, Local Economic Growth

1. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diakui mempunyai peranan besar dalam struktur perekonomian, di negara berkembang maupun maju. UMKM berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja, pendapatan, serta penguatan ekonomi berbasis lokal. Berbagai analisis menunjukkan bahwa daya tahan UMKM terhadap krisis ekonomi lebih kuat dibandingkan sektor usaha berskala besar, sehingga menjadikannya sarana strategis dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dalam konteks internasional, pendekatan pembangunan ekonomi berbasis lokal (*local economic development*) menempatkan UMKM sebagai aktor utama yang tidak hanya dipandang sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika sosial dan kelembagaan masyarakat. Literatur global menekankan bahwa keberhasilan pemberdayaan UMKM tidak semata ditentukan oleh akses terhadap modal

Analisis Program Pemberdayaan UMKM Melalui Pendampingan Peran Pemerintah Kecamatan Dan Partisipasi Pelaku UMKM Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Lokal Di Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan

atau teknologi, melainkan oleh kualitas pendampingan, dukungan institusional pemerintah lokal, serta tingkat partisipasi aktif pelaku usaha dalam proses pengembangan usahanya. Dengan demikian, pemberdayaan UMKM dipahami sebagai proses sosial yang melibatkan interaksi antaraktor, negosiasi kepentingan, serta konstruksi makna terhadap program-program pembangunan yang dijalankan. Di Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai program pemberdayaan UMKM, baik melalui kebijakan nasional maupun pelaksanaan di tingkat daerah. Pada level kecamatan, peran pemerintah menjadi penting karena kedekatannya dengan pelaku UMKM yang melingkupinya. Pemerintah berperan sebagai fasilitator, regulator, katalisator, dan pendukung akses sumber daya untuk UMKM (Rahmayanti, 2024:115 ; Maulida *et al.*, 2023:49). Pemerintah kecamatan tidak hanya berfungsi melaksanakan kebijakan, tetapi juga sebagai penghubung antara pelaku UMKM dengan berbagai sumber daya pembangunan. Namun demikian, efektivitas peran ini sangat bergantung pada pola pendampingan yang diterapkan serta sejauh mana pelaku UMKM dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan program.

Kecamatan Medan Tuntungan sebagai salah satu wilayah di Kota Medan yang memiliki karakteristik ekonomi lokal yang didukung oleh keberadaan UMKM di berbagai sektor usaha. Berbagai inisiatif pemberdayaan telah dilakukan, termasuk program pendampingan usaha, pelatihan, serta fasilitasi akses terhadap informasi dan jaringan sosial. Meskipun demikian, penerapan program tersebut tidak selalu berjalan secara lancar. Terdapat variasi dalam tingkat partisipasi pelaku UMKM, perbedaan persepsi terhadap manfaat program, serta tantangan koordinasi antara pemerintah kecamatan dan pelaku usaha. Literatur global menegaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan UMKM tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan modal dan akses teknologi, tetapi juga oleh dukungan institusional pemerintah lokal serta kualitas interaksi antara aktor yang terlibat (Pretty 2019:590). Fenomena ini menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM tidak dapat dipahami hanya dari metode kuantitatif, tetapi perlu ditelusuri melalui pengalaman, proses, dan tujuan yang dibangun oleh para pelaku yang terlibat.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai pemberdayaan UMKM dan pertumbuhan ekonomi lokal umumnya masih didominasi oleh metode kuantitatif yang berpusat pada pengukuran pengaruh program terhadap peningkatan pendapatan, produktivitas, atau penyerapan tenaga kerja. Meskipun penting, pendekatan tersebut cenderung menyederhanakan kompleksitas realitas sosial dan kurang menggali bagaimana program pemberdayaan dijalankan, dimaknai, serta dinegosiasikan oleh pelaku UMKM dan pemerintah lokal dalam keseharian mereka. Selain itu, penelitian yang secara khusus meneliti interaksi antara pendampingan, peran pemerintah kecamatan, dan partisipasi pelaku UMKM dalam satu kerangka analisis yang masih relatif terbatas, khususnya pada level kecamatan. Pendampingan yang aktif dan berkelanjutan mampu mendorong inovasi, pemasaran digital, serta peningkatan kapasitas pelaku UMKM (Rosita Wahyiah *et al*, 2024:37; Buntuang *et al.*, 2024:62).

Kecenderungan dominasi pendekatan kuantitatif dalam penelitian pemberdayaan UMKM terlihat dari fokus analisis yang menitikberatkan pada variabel terukur seperti pertumbuhan pendapatan, peningkatan produktivitas, dan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja. Beberapa studi menunjukkan bahwa indikator-indikator tersebut menjadi tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan program pemberdayaan (Rahmayanti, 2024:118; Maulida, 2023:52). Namun, pendekatan tersebut belum sepenuhnya mampu menjelaskan dinamika relasional antara pemerintah lokal dan pelaku UMKM, termasuk proses komunikasi, pembentukan kepercayaan, serta adaptasi program terhadap kebutuhan riil di lapangan. Dimensi sosial dalam pemberdayaan UMKM sering kali tereduksi menjadi angka-angka statistik, sehingga makna partisipasi dan pengalaman subjektif pelaku usaha kurang tergali secara mendalam. Padahal, efektivitas program tidak hanya ditentukan oleh output ekonomi, tetapi juga oleh sejauh mana pelaku UMKM merasa dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program (Rahmayanti, 2024:120). Dalam konteks ini, penelitian yang mengkaji interaksi antara pendampingan, peran pemerintah kecamatan, dan partisipasi pelaku UMKM secara terpadu masih relatif terbatas, khususnya pada level kecamatan sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat. Sementara itu, beberapa temuan empiris menegaskan bahwa pendampingan yang dilakukan secara intensif dan berkelanjutan berkontribusi terhadap peningkatan inovasi produk, adopsi pemasaran digital, serta penguatan kapasitas manajerial pelaku UMKM (Wahyiah, 2024:37; Erdiyansyah *et al*, 2024:62). Hal ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan tidak dapat dilepaskan dari kualitas interaksi antara pendamping, pemerintah lokal, dan pelaku usaha itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan penelitian yang mampu menggali proses, pengalaman, dan konstruksi makna para pelaku secara lebih mendalam guna memahami bagaimana pemberdayaan UMKM berlangsung dalam konteks ekonomi lokal.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kebutuhan akademik untuk membuat penelitian yang tidak hanya menjawab apakah program pemberdayaan UMKM berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi lebih jauh menjelaskan bagaimana proses pemberdayaan itu berlangsung, bagaimana peran pemerintah kecamatan dilaksanakan dan direalisasikan, serta bagaimana pelaku UMKM memahami partisipasi mereka dalam program tersebut. Metode kualitatif menjadi relevan untuk menggali penelitian ini lebih detail dari peneliti terdahulu. Berdasarkan penjelasan latar belakang penelitian, dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemberdayaan UMKM di Kecamatan Medan Tuntungan, khususnya dalam kaitannya dengan pendampingan, peran pemerintah kecamatan, dan partisipasi pelaku UMKM dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.

Di sisi lain, kualitas dan keberlanjutan pendampingan menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan penguatan kapasitas pelaku UMKM, terutama dalam aspek inovasi dan adaptasi digital (Saepudin, 2024:38). Kurangnya keterlibatan aktif pelaku usaha dalam setiap tahapan program juga dapat membatasi dampak ekonomi yang diharapkan (Buntuang, Erdiyansyah, et al., 2024:64).

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan yang muncul dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Program pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan di tingkat kecamatan telah mencakup berbagai bentuk pendampingan dan fasilitasi, namun proses pelaksanaannya belum sepenuhnya dipahami dari perspektif pengalaman dan pemahaman pelaku UMKM sebagai subjek utama program.
2. Peran pemerintah kecamatan dalam pemberdayaan UMKM secara telah ditetapkan sebagai fasilitator dan penghubung kebijakan, tetapi dalam praktiknya terdapat perbedaan dalam bentuk keterlibatan, intensitas pendampingan, serta interaksi dengan pelaku UMKM yang belum banyak diteliti secara mendalam.
3. Tingkat partisipasi pelaku UMKM dalam program pemberdayaan menunjukkan dinamika yang beragam, baik dari segi keikutsertaan, keterlibatan, maupun pendapat terhadap manfaat program, yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui metode kuantitatif.
4. Hubungan antara pendampingan, peran pemerintah kecamatan, dan partisipasi pelaku UMKM dalam konteks pertumbuhan ekonomi lokal cenderung dipahami secara terpisah, sehingga belum tergambar secara utuh sebagai suatu proses sosial yang saling terkait dan kontekstual.

Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak memfokuskan pada hasil atau dampak program pemberdayaan UMKM, sementara aspek proses, makna, serta interaksi antar pelaku di tingkat kecamatan masih relatif kurang mendapat perhatian. Berdasarkan latar belakang yang telah saya buat, penelitian ini dilakukan dari kesenjangan pemahaman teoritis, dan observasi terkait proses pemberdayaan UMKM pada tingkat lokal, khususnya yang menyangkut pengalaman dan dinamika sosial para pelaku yang terlibat. Oleh karena itu, fokus penelitian diarahkan pada analisis program pemberdayaan UMKM melalui pendampingan, peran pemerintah kecamatan, dan partisipasi pelaku UMKM dalam konteks peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal di Kecamatan Medan Tuntungan.

Adapun rumusan masalah penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian kualitatif sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan program pemberdayaan UMKM melalui pendampingan di Kecamatan Medan Tuntungan?
2. Bagaimana peran pemerintah Kecamatan Medan Tuntungan dalam mendukung dan memfasilitasi pemberdayaan UMKM?
3. Bagaimana bentuk dan makna partisipasi pelaku UMKM dalam program pemberdayaan yang dijalankan?
4. Bagaimana interaksi antara pendampingan, peran pemerintah kecamatan, dan partisipasi pelaku UMKM dalam konteks pertumbuhan ekonomi lokal?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut dirancang untuk menggali makna, proses, dan pengalaman subjektif para pelaku, bukan untuk menguji hubungan sebab-akibat secara statistik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemberdayaan UMKM di Kecamatan Medan Tuntungan melalui pendampingan, peran pemerintah kecamatan, dan partisipasi pelaku UMKM, guna memperdalam pemahaman mengenai dinamika pertumbuhan ekonomi lokal dalam konteks sosial yang melingkupinya.

Sejalan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis proses pelaksanaan program pemberdayaan UMKM melalui pendampingan di Kecamatan Medan Tuntungan.
2. Membahas peran pemerintah kecamatan dalam mendukung pemberdayaan UMKM pada tingkat lokal.
3. Memahami bentuk serta makna partisipasi pelaku UMKM dalam program pemberdayaan.
4. Menjelaskan dinamika sosial yang terbentuk dari interaksi antara pendampingan, peran pemerintah kecamatan, dan partisipasi pelaku UMKM dalam konteks pertumbuhan ekonomi lokal.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Medan Tuntungan yang berada di Kota Medan. Wilayah ini dipilih karena terdapat inisiatif penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah yang melibatkan pemerintah kecamatan serta pelaku UMKM secara langsung. Pemilihan lokasi penelitian mempertimbangkan kesesuaian antara fenomena yang terjadi dengan fokus kajian mengenai pemberdayaan dan pembangunan ekonomi lokal. Penentuan lokasi dalam penelitian kualitatif harus didasarkan pada pertimbangan relevansi konteks agar data yang diperoleh benar-benar mencerminkan realitas sosial yang diteliti (Creswell, 2020:190). Dengan memilih lokasi yang memiliki aktivitas pemberdayaan yang nyata, peneliti dapat mengamati praktik, interaksi, dan dinamika program secara langsung.

Kecamatan Medan Tuntungan juga memiliki karakteristik ekonomi lokal yang ditopang oleh keberadaan UMKM di berbagai sektor, seperti perdagangan, jasa, dan industri rumah tangga. Kondisi ini menjadikan wilayah tersebut relevan sebagai ruang analisis untuk memahami bagaimana kebijakan dan pendampingan diterapkan dalam konteks ekonomi skala kecamatan. Dalam penelitian kualitatif, pemahaman terhadap latar sosial dan karakteristik wilayah menjadi bagian penting dalam membangun interpretasi yang komprehensif (Moleong, 2021:96). Oleh

karena itu, konteks sosial dan ekonomi Kecamatan Medan Tuntungan menjadi bagian penting dalam analisis penelitian ini.

Fokus penelitian diarahkan pada program pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan melalui pendampingan, peran aktif pemerintah kecamatan, serta partisipasi pelaku usaha dalam berbagai tahapan kegiatan. Program tersebut dipahami sebagai rangkaian proses sosial yang melibatkan komunikasi, koordinasi, serta negosiasi antar pelaku. Dalam pendekatan kualitatif, objek penelitian tidak diposisikan sebagai variabel yang diukur secara statistik, tetapi sebagai peristiwa sosial yang dimaknai oleh subjek yang terlibat di dalamnya (Moleong, 2021:9). Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali bagaimana pelaku UMKM memaknai pengalaman mereka dalam mengikuti program pemberdayaan serta bagaimana pemerintah kecamatan menjalankan perannya.

Selain itu, penelitian ini juga memerhatikan hubungan antara struktur kelembagaan dan praktik di lapangan. Analisis tidak hanya berhenti pada deskripsi kegiatan, tetapi juga berupaya memahami pola relasi yang terbentuk antara pemerintah kecamatan dan pelaku UMKM. Pemahaman tersebut penting karena penelitian kualitatif menekankan pada interpretasi terhadap tindakan sosial dan makna yang melekat di dalamnya (Sugiyono, 2022:287).

Penelitian ini berlangsung dalam rentang waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan pengumpulan data di lapangan. Penentuan periode penelitian mempertimbangkan kecukupan waktu untuk melakukan observasi, wawancara mendalam, serta penelaahan dokumen secara bertahap. Proses pengumpulan data dalam penelitian kualitatif memerlukan keterlibatan peneliti secara langsung dan berkesinambungan agar data yang diperoleh valid dan kaya informasi (Creswell, 2020:195). Oleh karena itu, pemilihan waktu penelitian menjadi bagian penting dalam menjamin kedalaman analisis serta keakuratan interpretasi terhadap fenomena yang diteliti.

2.1. Populasi dan Sampel/Sumber Data

Populasi mencakup seluruh pihak yang terlibat aktif dalam inisiatif penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah Kecamatan Medan Tuntungan. Pihak tersebut meliputi pejabat pemerintah kecamatan, pendamping atau mentor UMKM, serta para pelaku usaha yang mengikuti program pemberdayaan. Dalam penelitian kualitatif, populasi tidak dipahami sebagai kumpulan individu dalam arti statistik, tetapi sebagai arena sosial tempat interaksi dan proses sosial berlangsung (Moleong, 2021:224). Arena sosial ini menjadi ruang utama untuk memahami makna, pengalaman, dan dinamika pemberdayaan UMKM secara kontekstual.

Pemilihan sampel dilakukan dengan pendekatan purposive, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Informan dipilih karena memiliki keterlibatan langsung, pengalaman praktis, dan pemahaman terhadap pelaksanaan program penguatan UMKM. Teknik purposive memungkinkan peneliti memperoleh data yang mendalam dan spesifik sesuai kebutuhan analisis (Creswell, 2020:201). Sugiyono (2022:301) juga menjelaskan bahwa purposive sampling efektif dalam penelitian kualitatif karena peneliti dapat menentukan informan yang dianggap paling mengetahui fenomena yang diteliti.

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dan penggunaan kuesioner terbuka. Wawancara mendalam memungkinkan peneliti menggali pengalaman, persepsi, serta interpretasi informan secara detail (Moleong, 2021:186). Kuesioner terbuka digunakan untuk memberikan ruang bagi responden dalam menyampaikan pandangan mereka tanpa batasan pilihan jawaban.

Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi yang berkaitan dengan program penguatan UMKM, seperti laporan kegiatan, peraturan, dan arsip administratif. Dokumentasi berfungsi sebagai sumber pendukung untuk memperkuat hasil wawancara dan memberikan konteks terhadap temuan lapangan (Sugiyono, 2022:314). Penggabungan data primer dan sekunder ini meningkatkan kedalaman analisis serta memperkuat validitas temuan melalui proses triangulasi sumber (Creswell, 2020:217).

Penelitian ini tidak menggunakan variabel dalam pengertian kuantitatif. Istilah yang digunakan dijelaskan secara operasional untuk memperjelas fokus analisis. Pemberdayaan UMKM dipahami sebagai proses interaksi antara pendamping dan pelaku UMKM dalam peningkatan kapasitas usaha.

Peran pemerintah kecamatan dimaknai sebagai tindakan dan praktik yang dilakukan untuk memfasilitasi, mengoordinasikan, dan mendukung program pemberdayaan UMKM. Peran ini dianalisis melalui pengalaman aktor yang terlibat.

Maulida *et al* (2023:568) menunjukkan bahwa peran pemerintah lokal dapat dipahami melalui praktik kebijakan di tingkat lapangan.

Partisipasi pelaku UMKM dipahami sebagai keterlibatan aktif pelaku usaha dalam program pemberdayaan, baik dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kegiatan. Partisipasi dipandang sebagai proses bermakna, bukan sekadar kehadiran formal.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan memadukan dua teknik utama agar informasi yang diperoleh lebih mendalam dan beragam. Kombinasi teknik ini membantu peneliti memahami pengalaman, pandangan, serta makna yang dibangun oleh para pelaku UMKM dan aparaturnya terhadap program pemberdayaan yang dijalankan.

1. Wawancara

Wawancara mendalam digunakan sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Peneliti melakukan interaksi langsung dengan informan untuk menggali pengalaman, persepsi, serta penilaian mereka terhadap proses pendampingan, peran pemerintah kecamatan, dan bentuk partisipasi dalam program pemberdayaan UMKM. Melalui wawancara, informan dapat menjelaskan secara rinci proses yang mereka alami, kendala yang dihadapi, serta dampak yang dirasakan. Teknik ini memberi ruang bagi peneliti untuk melakukan pendalaman pertanyaan sesuai jawaban informan sehingga data yang diperoleh bersifat kaya, reflektif, dan kontekstual.

2. Kuesioner

Selain wawancara, penelitian ini menggunakan kuesioner terbuka sebagai teknik pendukung. Kuesioner diberikan kepada pelaku UMKM untuk menjaring pengalaman tertulis yang mungkin belum seluruhnya terungkap dalam sesi wawancara. Pertanyaan disusun dalam bentuk terbuka dan naratif agar responden dapat menjawab secara bebas sesuai dengan pengalaman dan pandangan mereka. Data yang diperoleh dari kuesioner tidak diolah menggunakan analisis statistik, tetapi dianalisis sebagai data naratif. Penggunaan kuesioner bertujuan memperluas variasi data, memperkaya sudut pandang informan, serta memperkuat hasil wawancara melalui perbandingan dan pendalaman informasi.

Berdasarkan jenis data penelitian ini yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, maka teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa data menurut Miles dan Huberman (2014:10) yang mencakup tiga kegiatan yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data, pada kegiatan ini peneliti mengolah data yang dikumpul berkaitan dengan program pemberdayaan umkm melalui pendampingan, peran pemerintah kecamatan, dan partisipasi pelaku dalam pertumbuhan ekonomi lokal diringkas agar mudah dipahami.
2. Penyajian data, kegiatan ini berupa pengambilan tindakan yang memberikan kemungkinan untuk disajikan dalam bentuk naratif, tulisan secara sistematis untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan.
3. Penarikan kesimpulan. Tahapan ini peneliti membuat susunan sistematis berdasarkan data yang telah ada dan membuat laporan hasil penelitian berupa analisis program pemberdayaan UMKM melalui pendampingan, peran pemerintah kecamatan, dan partisipasi pelaku UMKM dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.

2.2. Organisasi Manuskrip

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi Sumatera Utara merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk mendukung pengembangan sektor koperasi dan UMKM sebagai pilar ekonomi daerah. Pembentukan dinas ini berakar pada kebijakan nasional yang menempatkan UMKM sebagai sektor strategis dalam pembangunan ekonomi, terutama dalam peningkatan kesempatan kerja dan penguatan ekonomi berbasis lokal. Secara administratif, kantor Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara beralamat di Jalan Gatot Subroto Km. 5,5 Medan, Sumatera Utara. Lokasi ini menjadi pusat koordinasi pelaksanaan program pembinaan dan pemberdayaan UMKM di tingkat provinsi.

Pembentukan dinas ini merupakan bagian dari penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah yang mengacu pada kebijakan otonomi daerah. Secara kelembagaan, dinas ini ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang pembentukan organisasi perangkat daerah yang mulai berlaku sekitar tahun 2016 sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penetapan ini menjadi dasar hukum bagi dinas dalam menjalankan fungsi pembinaan koperasi dan UMKM secara lebih terarah dan terintegrasi.

Pada awalnya, urusan koperasi dan usaha kecil masih berada dalam satu struktur dengan sektor perdagangan dan industri. Seiring meningkatnya peran UMKM dalam perekonomian, pemerintah daerah melakukan penataan kelembagaan dengan membentuk dinas khusus yang menangani koperasi dan UMKM secara lebih fokus. Penyesuaian ini bertujuan meningkatkan efektivitas program pembinaan serta memperkuat dukungan terhadap pelaku usaha di tingkat lokal.

Perubahan struktur organisasi dinas terus dilakukan mengikuti perkembangan regulasi pemerintah daerah. Penataan ini mengacu pada kebijakan otonomi daerah yang memberi kewenangan lebih besar kepada pemerintah provinsi dalam mengelola potensi ekonomi wilayah. Dalam konteks ini, dinas memiliki peran strategis dalam merancang kebijakan, mengoordinasikan program, serta mengawasi pelaksanaan pemberdayaan koperasi dan UMKM.

Dalam perkembangannya, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator yang menghubungkan pelaku UMKM dengan berbagai sumber daya. Program yang dijalankan mencakup pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, penguatan kelembagaan koperasi, serta fasilitasi akses permodalan dan pemasaran. Pendekatan yang digunakan menekankan peningkatan kapasitas pelaku usaha agar mampu berkembang secara mandiri.

Selain itu, dinas juga mengembangkan layanan berbasis pelatihan dan konsultasi melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah yang memberikan dukungan langsung kepada pelaku UMKM. Kehadiran unit ini memperkuat pelaksanaan program di lapangan karena memungkinkan interaksi yang lebih intensif antara pemerintah dan pelaku usaha.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan dinamika pasar, dinas mulai mengarahkan program pemberdayaan pada aspek digitalisasi usaha, pengembangan inovasi produk, serta perluasan jaringan pemasaran. Kebijakan ini

bertujuan meningkatkan daya saing UMKM dalam menghadapi persaingan ekonomi yang semakin terbuka. Dalam konteks penelitian ini, keberadaan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara menjadi penting karena berperan sebagai aktor utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan. Program yang dirancang oleh dinas kemudian diimplementasikan hingga tingkat kabupaten, kota, dan kecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan UMKM melibatkan koordinasi lintas tingkat pemerintahan yang saling berkaitan. Dengan latar belakang tersebut, dinas tidak hanya berfungsi sebagai institusi administratif, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pemberdayaan yang memengaruhi peningkatan kapasitas pelaku UMKM, partisipasi dalam program, serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

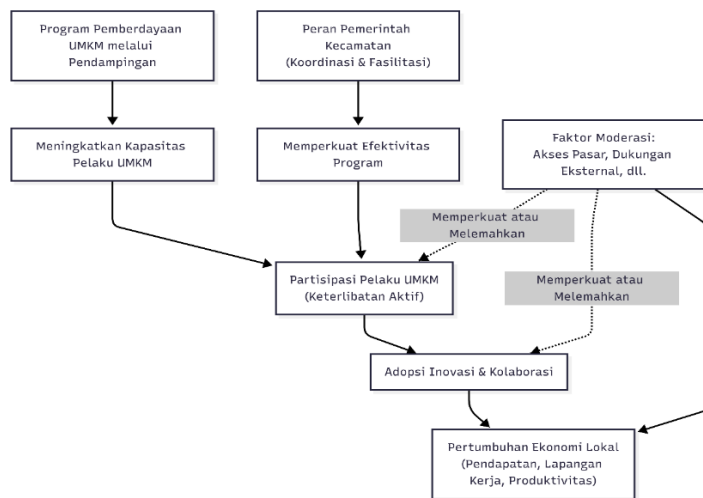
2.3. Tabel

Tabel harus diberi nomor sesuai urutan presentasi (Tabel 1, dst.). Judul tabel ditulis diatas tabel dengan posisi rata tengah (*center justified*), tidak ada cetak tebal maupun berwarna. Font yang dipakai berukuran 8pt baik judul tabel maupun isi tabel. **Tabel harus diacu dan dirujuk dalam manuskrip dan jarak 1 spasi.** Tidak ada garis tegak lurus dalam tabel.

Tabel 1. Tabel Software dan Hardware Pendukung

| Product | Server | Client |
|------------|-------------|------------|
| Clementine | Solaris 2.X | X Windows |
| Darwin | Solaris 2.X | Windows NT |
| PRW | Data on | Windows NT |

2.4. Gambar



Gambar 2.4 Kerangka Konseptual

2.5. Daftar Rujukan

- Ismail, K., Rohmah, M., & Putri, D. A. P. (2023). Peranan UMKM Dalam Penguatan Ekonomi Indonesia. *Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 7(2), 208–217. <https://doi.org/10.31851/Neraca.V7i2.14344>
- Nurhayati, S., Maulana, S., Ramadhanti, M., & Suherman, I. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Melalui Pendampingan Peningkatan Kapasitas Pelaku UMKM Desa Cibalung. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 269–276. <https://doi.org/10.30997/Almujtamae.V3i3.6619>
- Rahmayanti, A. (2024). The Role Of Local Government In The Empowerment Of MSME Actors In Palopo City. *Journal Of Government And Public Policy*, 11(2). <https://doi.org/10.18196/Jgpp.V11i2.21154>
- Arnstein, S. R. (2020). A Ladder Of Citizen Participation. *Journal Of The American Planning Association*, 86(2), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944363.2018.1559388>
- OECD. (2021). *The Role Of Smes In Local Economic Development*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/808e9538-En>
- Pike, A., Rodríguez-Pose, A., & Tomaney, J. (2020). *Local And Regional Development*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429057990>
- Sari, M., & Putra, A. (2022). Model Pendampingan UMKM Berbasis Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi*, 8(1), 70–85.
- Siregar, H. (2023). Model Pemberdayaan UMKM Berbasis Proses Dalam Meningkatkan Ketahanan Usaha. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 11(2), 140–152.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Tambunan, T. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan UMKM. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 6(1), 55–68.

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.10586>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

- Wahyuni, L. (2021). Integrasi Kebijakan Daerah Dan Pendampingan UMKM Dalam Meningkatkan Daya Saing Digital. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 10(1), 55–68.
- Wahyiah, I. R., Saepudin, E. A., Rendiyani, M., & Sabrina, I. (2024). *Pendampingan Peningkatan Dan Pengembangan UMKM Pariwisata Di Desa Sukajadi, Kecamatan Carita*. *Jurnal AMPOEN*, 3(1), 30–45
- Wahyiah, I. R., Saepudin, E. A., Rendiyani, M., & Sabrina, I. (2024). *Pendampingan Peningkatan Dan Pengembangan UMKM Pariwisata Di Desa Sukajadi, Kecamatan Carita*. *Jurnal AMPOEN*, 3(1), 30–45
- Wulandari, S., & Hidayat, M. (2024). Efektivitas Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Pemberdayaan UMKM. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial*, 12(1), 108–120.
- 'Adzim, M., & Vrikati, A. (2020). Landasan Teori Dalam Penelitian Ilmiah Sebagai Dasar Pemecahan Masalah. *Jurnal Ilmiah Metodologi Penelitian*, 4(2), 85–94.
- Aji, R., *Et Al.* (2020). Peluang Dan Tantangan Digitalisasi UMKM Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Digital*, 11(2), 22-39
- Arnstein, S. R. (2020). A Ladder Of Citizen Participation. *Journal Of The American Planning Association*, 86(2), 216–224.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan aparaturnya kecamatan, pendamping UMKM, dan pelaku usaha, diketahui bahwa program pemberdayaan UMKM di Kecamatan Medan Tuntungan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, seperti pelatihan usaha, konsultasi, dan pendampingan secara langsung. Program ini pada dasarnya bertujuan membantu pelaku UMKM agar lebih memahami cara mengembangkan usahanya dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan usaha saat ini. Aparatur kecamatan menjelaskan bahwa sebelum program dilaksanakan, pemerintah terlebih dahulu melakukan pendataan dan melihat kebutuhan pelaku usaha di lapangan. Program yang diberikan tidak sepenuhnya sama untuk semua pelaku UMKM karena setiap usaha memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda. Hal ini terlihat dari pernyataan informan berikut: **“Program disusun berdasarkan kebutuhan pelaku UMKM. Kami koordinasi dengan dinas dan melakukan pendataan usaha. Kegiatan utama berupa pelatihan dan pendampingan.”**

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pemerintah berusaha menyesuaikan program dengan keadaan nyata yang dihadapi pelaku usaha. Pendampingan tidak hanya dilakukan dalam bentuk pemberian materi, tetapi juga dilakukan melalui komunikasi langsung agar pelaku UMKM lebih mudah memahami informasi yang diberikan. Pendampingan UMKM juga menjelaskan bahwa kegiatan pendampingan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Pendampingan tidak hanya hadir ketika pelatihan berlangsung, tetapi juga melakukan pemantauan terhadap perkembangan usaha pelaku UMKM setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Informan menyampaikan: **“Pendampingan dilakukan melalui pelatihan, konsultasi usaha, dan monitoring berkala. Kami juga menyesuaikan materi dengan kondisi usaha mereka.”**

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa proses pendampingan lebih menekankan pada pendekatan langsung kepada pelaku usaha. Pendampingan mencoba memahami masalah yang dihadapi UMKM agar solusi yang diberikan lebih sesuai dengan kondisi usaha mereka. Pelaku UMKM yang mengikuti program juga memberikan tanggapan yang cukup positif terhadap kegiatan pendampingan. Sebagian besar pelaku usaha merasa bahwa program tersebut membantu mereka memperoleh pengetahuan baru terkait pengelolaan usaha. Salah satu pelaku UMKM mengatakan:

“Saya mendapatkan pelatihan dan bantuan informasi usaha. Program ini membantu saya memahami cara mengelola usaha.”

Pelaku usaha lain juga menyampaikan bahwa setelah mengikuti pelatihan, mereka mulai memahami pentingnya pemasaran dan pencatatan keuangan usaha.

“Saya lebih paham pemasaran dan pencatatan keuangan setelah ikut kegiatan.”

Dari hasil tersebut terlihat bahwa pendampingan memberikan manfaat bagi pelaku usaha, terutama dalam meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan usaha. Sebelum mengikuti program, sebagian pelaku UMKM masih menjalankan usaha secara sederhana tanpa pencatatan yang jelas. Setelah mengikuti pendampingan, mereka mulai mencoba menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kegiatan usaha sehari-hari. Meskipun demikian, tidak semua pelaku UMKM dapat mengikuti kegiatan secara rutin. Beberapa pelaku usaha mengaku mengalami kendala dalam membagi waktu antara mengikuti kegiatan dan menjalankan usahanya. Salah satu informan menyampaikan:

“Saya ikut beberapa kegiatan, tapi kadang terkendala waktu.”

Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan pelaku usaha masih berbeda-beda. Ada pelaku usaha yang aktif mengikuti seluruh kegiatan, tetapi ada juga yang hanya mengikuti sebagian kegiatan karena kesibukan usaha.

3.1. Spesifikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kecamatan memiliki peran yang cukup penting dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM. Pemerintah kecamatan berfungsi sebagai fasilitator yang membantu pelaku usaha mendapatkan akses terhadap program-program pemberdayaan.

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.10586>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Dalam pelaksanaannya, pemerintah kecamatan membantu proses koordinasi dengan dinas terkait, penyebaran informasi kegiatan, hingga membantu administrasi pelaku usaha. Aparatur kecamatan menjelaskan: **“Kami bertindak sebagai fasilitator. Kami menghubungkan pelaku UMKM dengan dinas, membantu administrasi, dan memfasilitasi kegiatan.”**

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kecamatan tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai penghubung antara pelaku UMKM dengan lembaga atau program yang dapat membantu perkembangan usaha mereka. Selain membantu pelaksanaan program, pemerintah kecamatan juga melakukan upaya untuk meningkatkan keterlibatan pelaku UMKM dalam kegiatan pemberdayaan. Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat dan pelaku usaha. Namun, dalam pelaksanaannya pemerintah kecamatan masih menghadapi beberapa kendala. Aparatur kecamatan menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan program. Selain itu, tidak semua pelaku usaha aktif mengikuti kegiatan yang telah disediakan. Informan menyampaikan: **“Kendala utama adalah keterbatasan anggaran dan partisipasi pelaku UMKM yang belum merata.”**

Dari hasil penelitian tersebut dapat dipahami bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh keterlibatan pelaku usaha itu sendiri.

Pelaku UMKM juga memberikan tanggapan terkait peran pemerintah kecamatan. Sebagian besar menilai bahwa pemerintah cukup membantu dalam memberikan informasi dan pelatihan usaha. Salah satu pelaku UMKM mengatakan:

“Pemerintah kecamatan cukup membantu dalam menyediakan informasi dan kegiatan pelatihan.”

Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan pemerintah kecamatan masih dianggap penting oleh pelaku usaha, terutama sebagai pihak yang membantu mereka memperoleh akses terhadap program pemberdayaan.

3.2. Layout Manuskrip

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan kuesioner terbuka, dapat diketahui bahwa proses pendampingan UMKM di Kecamatan Medan Tuntungan bukan sekadar kegiatan pelatihan yang dilakukan satu kali, melainkan suatu proses pembelajaran yang berlangsung secara bertahap dan membutuhkan keterlibatan langsung antara pendamping dengan pelaku usaha. Pendampingan yang dilakukan lebih menekankan pada proses pembinaan yang berkelanjutan agar pelaku UMKM mampu memahami dan mengembangkan usahanya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi usaha yang mereka jalankan. Dalam pelaksanaannya, pendampingan dilakukan melalui beberapa bentuk kegiatan, seperti pelatihan usaha, konsultasi, pemberian arahan usaha, hingga monitoring perkembangan usaha. Pendamping tidak hanya menyampaikan materi secara umum, tetapi juga mencoba memahami persoalan yang dihadapi pelaku UMKM secara langsung di lapangan. Dengan pendekatan tersebut, pelaku usaha merasa lebih mudah memahami materi yang diberikan karena pembahasan dilakukan berdasarkan pengalaman dan kondisi nyata usaha mereka sehari-hari.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM merasa terbantu dengan adanya program pendampingan. Sebelum mengikuti program, beberapa pelaku usaha masih menjalankan usaha secara sederhana dan belum memahami pentingnya pengelolaan usaha yang baik. Sebagian dari mereka belum melakukan pencatatan keuangan secara teratur, belum memahami strategi pemasaran, dan masih mengandalkan cara penjualan yang tradisional. Setelah mengikuti pendampingan, pelaku usaha mulai memperoleh pemahaman baru mengenai pentingnya pengelolaan usaha yang lebih terarah.

Beberapa pelaku UMKM mulai mencoba pencatatan pemasukan dan pengeluaran usaha, memperbaiki cara pemasaran produk, serta mencoba memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi usaha. Walaupun perubahan yang terjadi belum terlalu besar, namun pelaku usaha mulai menunjukkan adanya kesadaran untuk mengembangkan usaha secara lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendampingan memiliki peran dalam meningkatkan pengetahuan dan pola pikir pelaku usaha terhadap pengelolaan usaha mereka.

Selain memberikan pelatihan dan arahan usaha, pendamping juga melakukan monitoring terhadap perkembangan usaha pelaku UMKM setelah kegiatan berlangsung. Monitoring dilakukan untuk melihat sejauh mana pelaku usaha memahami materi yang telah diberikan dan apakah pengetahuan tersebut diterapkan dalam kegiatan usaha sehari-hari. Melalui monitoring, pendamping dapat mengetahui kesulitan yang masih dihadapi pelaku usaha sehingga dapat memberikan penjelasan dan arahan tambahan apabila diperlukan.

Pendampingan yang dilakukan secara langsung dan berkelanjutan membuat hubungan antara pendamping dan pelaku usaha menjadi lebih dekat. Pelaku UMKM merasa lebih nyaman menyampaikan kendala usaha yang mereka hadapi karena adanya komunikasi yang lebih terbuka. Kondisi tersebut membantu pendamping dalam memahami kebutuhan pelaku usaha sehingga solusi yang diberikan menjadi lebih sesuai dengan kondisi lapangan. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan pendampingan UMKM masih menghadapi beberapa hambatan. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya tingkat partisipasi pelaku usaha dalam mengikuti program secara rutin. Tidak semua pelaku UMKM dapat mengikuti seluruh kegiatan yang diadakan karena sebagian besar pelaku usaha lebih fokus menjalankan aktivitas usaha sehari-hari. Banyak pelaku

usaha yang mengalami kesulitan membagi waktu antara mengikuti kegiatan pemberdayaan dan menjaga usaha mereka tetap berjalan.

Beberapa pelaku usaha mengaku hanya mengikuti sebagian kegiatan karena khawatir meninggalkan usaha terlalu lama. Ada juga pelaku UMKM yang tidak selalu mengetahui jadwal kegiatan sehingga tidak dapat hadir dalam pelatihan atau pendampingan yang dilaksanakan. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat keterlibatan pelaku usaha dalam program pemberdayaan masih belum merata.

Selain masalah partisipasi, jumlah pelaku UMKM yang mengikuti program pemberdayaan juga masih tergolong sedikit dibandingkan jumlah keseluruhan pelaku usaha yang ada di Kecamatan Medan Tuntungan. Hal ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh pelaku UMKM di wilayah tersebut. Beberapa pelaku usaha masih belum aktif mengikuti program karena kurangnya informasi, keterbatasan waktu, atau belum memahami manfaat program pemberdayaan bagi usaha mereka.

Kondisi tersebut menyebabkan hasil pendampingan belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh pelaku UMKM. Pelaku usaha yang aktif mengikuti kegiatan cenderung memperoleh manfaat yang lebih besar dibandingkan pelaku usaha yang jarang mengikuti kegiatan. Dengan kata lain, keberhasilan pendampingan sangat dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan pelaku usaha selama proses kegiatan berlangsung.

Dari hasil penelitian ini dapat dipahami bahwa pendampingan UMKM merupakan proses yang membutuhkan waktu, keterlibatan, dan komunikasi yang berkelanjutan antara pendamping dan pelaku usaha. Keberhasilan program tidak hanya bergantung pada kualitas materi pelatihan atau kemampuan pendamping dalam memberikan arahan, tetapi juga dipengaruhi oleh kesadaran dan keaktifan pelaku UMKM dalam mengikuti setiap tahapan kegiatan pemberdayaan. Semakin aktif pelaku usaha terlibat dalam kegiatan, maka semakin besar peluang mereka untuk memperoleh manfaat dan meningkatkan kemampuan dalam mengelola usaha.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis program pemberdayaan UMKM melalui pendampingan, peran pemerintah kecamatan, dan partisipasi pelaku UMKM dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal di Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, maka dapat disimpulkan bahwa program pemberdayaan UMKM telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan usaha, konsultasi, dan pendampingan secara langsung kepada pelaku usaha. Program tersebut bertujuan membantu pelaku UMKM meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan usahanya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan memberikan manfaat bagi pelaku UMKM, terutama dalam meningkatkan pemahaman mengenai pemasaran usaha, pengelolaan keuangan, dan pengembangan usaha. Pendampingan tidak hanya dilakukan dalam bentuk penyampaian materi, tetapi juga melalui komunikasi langsung dan monitoring terhadap perkembangan usaha pelaku UMKM. Proses pendampingan tersebut membantu pelaku usaha memahami kondisi usahanya serta mulai menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Pemerintah Kecamatan Medan Tuntungan memiliki peran sebagai fasilitator dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM. Pemerintah membantu menyampaikan informasi program, menghubungkan pelaku usaha dengan dinas terkait, serta mendukung pelaksanaan kegiatan pemberdayaan di lapangan. Peran pemerintah kecamatan dinilai cukup penting karena sebagian pelaku UMKM masih membutuhkan dukungan dalam memperoleh akses terhadap program pengembangan usaha. Namun, pelaksanaan program masih menghadapi keterbatasan sumber daya dan anggaran sehingga belum seluruh pelaku UMKM dapat dijangkau secara optimal.

Partisipasi pelaku UMKM dalam program pemberdayaan menunjukkan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda. Pelaku usaha yang aktif mengikuti kegiatan cenderung memperoleh manfaat yang lebih besar dibandingkan pelaku usaha yang kurang aktif. Rendahnya partisipasi sebagian pelaku usaha dipengaruhi oleh kesibukan usaha, keterbatasan waktu, serta kondisi ekonomi yang membuat mereka lebih memprioritaskan aktivitas usaha sehari-hari. Selain itu, masih terdapat pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami manfaat program pemberdayaan bagi perkembangan usaha mereka.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa program pemberdayaan UMKM memberikan kontribusi terhadap peningkatan aktivitas usaha dan penguatan ekonomi lokal. Pelaku usaha mulai menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam pengelolaan usaha sehingga membuka peluang peningkatan pendapatan dan keberlanjutan usaha. Namun, dampak program terhadap pertumbuhan ekonomi lokal belum dirasakan secara merata karena masih dipengaruhi oleh tingkat partisipasi pelaku usaha, keterbatasan akses pasar, dan keterbatasan sumber daya usaha yang dimiliki pelaku UMKM.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan program pemberdayaan UMKM tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program pelatihan dan pendampingan, tetapi juga dipengaruhi oleh keterlibatan aktif pelaku usaha serta kemampuan pemerintah kecamatan dalam menjalankan fungsi fasilitasi dan pendampingan secara berkelanjutan. Pendampingan, peran pemerintah, dan partisipasi pelaku UMKM merupakan unsur yang saling berkaitan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal di Kecamatan Medan Tuntungan.

Reference

- 'Adzim, M., & Vrikati, A. (2020). Landasan teori dalam penelitian ilmiah sebagai dasar pemecahan masalah. *Jurnal Ilmiah Metodologi Penelitian*, 4(2), 85–94.
- Aji, R., et al. (2020). Peluang dan Tantangan Digitalisasi UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Digital*, 11(2), 22-39.
- Arnstein, S. R. (2020). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Planning Association*, 86(2), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944363.2018.1559388>
- Ismail, K., Rohmah, M., & Putri, D. A. P. (2023). Peranan UMKM dalam penguatan ekonomi Indonesia. *Neraca: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 7(2), 208–217. <https://doi.org/10.31851/neraca.v7i2.14344>
- Nurhayati, S., Maulana, S., Ramadhanti, M., & Suherman, I. (2023). Pemberdayaan ekonomi melalui pendampingan peningkatan kapasitas pelaku UMKM Desa Cibalung. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 269–276. <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v3i3.6619>
- OECD. (2021). The role of SMEs in local economic development. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/808e9538-en>
- Pike, A., Rodríguez-Pose, A., & Tomaney, J. (2020). Local and regional development. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429057990>
- Rahmayanti, A. (2024). The role of local government in the empowerment of MSME actors in Palopo City. *Journal of Government and Public Policy*, 11(2). <https://doi.org/10.18196/jgpp.v11i2.21154>
- Sari, M., & Putra, A. (2022). Model pendampingan UMKM berbasis peningkatan kapasitas kewirausahaan. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi*, 8(1), 70–85.
- Siregar, H. (2023). Model pemberdayaan UMKM berbasis proses dalam meningkatkan ketahanan usaha. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 11(2), 140–152.
- Sugiyono. (2022). Metode penelitian kualitatif. Alfabeta.
- Tambunan, T. (2021). Peran pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 6(1), 55–68.
- Wahyiah, I. R., Saepudin, E. A., Rendiyani, M., & Sabrina, I. (2024). Pendampingan peningkatan dan pengembangan UMKM pariwisata di Desa Sukajadi, Kecamatan Carita. *Jurnal AMPOEN*, 3(1), 30–45.
- Wahyuni, L. (2021). Integrasi kebijakan daerah dan pendampingan UMKM dalam meningkatkan daya saing digital. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 10(1), 55–68.
- Wulandari, S., & Hidayat, M. (2024). Efektivitas peran pemerintah kecamatan dalam pemberdayaan UMKM. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial*, 12(1), 108–120.